

Judul : Pemerintah mau tanam sawit untuk BBM, apakah pembentukan badan khusus diperlukan?
Tanggal : Jumat, 19 Desember 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Pemerintah Mau Tanam Sawit Untuk BBM Apakah Pembentukan Badan Khusus Diperlukan?

Presiden Prabowo Subianto memunculkan gagasan dan ide cemerlang untuk mengembangkan Energi Baru Terbarukan (EBT).
Caranya, dengan menanam sawit di Papua agar dapat swasembada energi dengan menghasilkan bahan bakar minyak (BBM) dari sawit.
"Dan juga nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit," kata Prabowo, saat memberi pengarahan dalam rapat percepatan

pembangunan Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Selain sawit, Ketua Umum Partai Gerindra ini juga ingin di Papua ditanam tebu, cassava hingga singkong agar bisa memproduksi etanol.
Jika program ini direalisasikan, dalam lima tahun ke depan, semua daerah, termasuk Papua, bisa swasembada energi dan swasembada pangan.
Merespon keinginan Presiden Prabowo, anggota Komisi IV DPR

Firman Soebagyo menyambut baik dan mendukung kebijakan Pemerintah dalam mengembangkan EBT dan pangan di Papua.
Namun, kata Firman, dalam membangun dan mengembangkan EBT di Papua dan wilayah lainnya mesti dibentuk badan khusus EBT. Nantinya, badan khusus EBT ini akan mengelola secara EBT dengan fokus dan profesional.
Apalagi, wacana pembentukan badan khusus EBT ini pernah disuarakan pada 2023. Saat itu, Dyah

Roro Esti Widiya Putri, anggota Komisi VII DPR RI yang mendorong adanya badan khusus EBT.
Ia mengungkapkan, potensi EBT sangat besar dan realisasinya sangat kecil, dan turut menjadi sorotan dunia internasional apalagi Indonesia termasuk negara yang bakal menerima bantuan pendanaan dari Just Energy Transition Partnership (JETP).
Manajer Riset Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Badiul Hadi kurang sepatutnya dengan wacana pembentukan

badan khusus EBT. Kata dia, permasalahan yang ada bukan karena kekosongan lembaga, tetapi karena perhatian Pemerintah yang dianggap kurang maksimal.
Justu, sambungnya, dengan situasi ekonomi negara yang belum stabil, pembentukan badan khusus EBT akan kontraproduktif.
Untuk melihat lebih jauh bagaimana pandangan dan pendapat Firman Soebagyo dan Badiul Hadi mengenai wacana pembentukan badan khusus EBT, berikut hasil wawancaranya.

FIRMAN SOEBAGYO, Anggota Komisi IV DPR RI

Agar Fokus, Karena Bukan Hanya Sawit



“Badan khusus yang mengelola EBT akan lebih tepat dan dibentuk yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI, agar lebih fokus dan terarah.”

Anda mengusulkan pembentukan badan khusus EBT?
Iya, saya termasuk yang mengusulkan kepada Pemerintah khususnya Pak Presiden agar pengelolaan EBT perlu dibentuk badan khusus.

Apa alasannya?
Agar lebih fokus, karena EBT tidak hanya dari sawit, tetapi juga dari bahan baku lain seperti singkong, nikel, dan lain-lain.
Dengan demikian, badan khusus yang mengelola EBT akan lebih tepat dan dibentuk yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI, agar lebih fokus dan terarah.

Apakah badan khusus EBT ini

bentuknya seperti kementerian?
Tidak. Bukan kementerian, hanya badan khusus saja, tetapi mempunyai kewenangan yang kuat dalam mengelola EBT yang ada di Indonesia.
Ya, kalau di pangan ada yang namanya Bulog. Nah, Bulog ini kan bisa mengelola pangan. Dan di EBT ini perlu dibentuk badan khusus seperti Bulog di pangan.

Bagaimana dengan pihak yang memimpin badan khusus ini. Apakah berasal dari ESDM atau lembaga yang sudah ada?
Nantinya orang-orang yang masuk dalam badan ini harus mempunyai kapasitas dan kapabilitas dalam urusan EBT. Untuk siapa yang memimpin kita senalakan

seperutnya kepada Presiden Prabowo.

Desakan Anda agar Pemerintah membentuk badan khusus EBT ini karena Presiden juga fokus untuk mengembangkan EBT ini?
Kami menyambut baik gagasan Presiden Prabowo untuk mengembangkan energi baru terbarukan (EBT) dengan memanfaatkan sawit di Papua sebagai bahan baku utama.
Kami juga menekankan bahwa hutan lindung harus tetap terjaga dan dilakukan penelitian cermat dari aspek Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Analisis Dampak Lingkungan (Andal), serta perencanaan yang matang dengan analisis studi yang melibatkan para pihak yang memiliki kompetensi. ■ REN

BADIUL HADI, Manajer Riset Seknas Fitra

Perspektif Anggaran, Ini Kontraproduktif



“Kami melihat masalah utamanya bukan kekurangan institusi, melainkan rendahnya efektivitas belanja energi.”

Apa respons dan tanggapan Anda dengan adanya desakan agar Pemerintah membentuk badan khusus EBT?

Wacana atau gagasan pembentukan badan khusus EBT patut dibaca dalam kerangka problem tata kelola, bukan semata kekosongan lembaga.
Persoalan utama transisi energi hari ini bukan absennya institusi, melainkan lemahnya konsistensi kebijakan, fragmentasi kewenangan, dan minimnya keberpihakan anggaran pada energi terbarukan.

Perlu ada riset dan penelitian mengenai kebutuhan adanya lembaga baru, ya?
Jika badan khusus EBT dibentuk

tanpa koreksi pada desain kebijakan dan anggaran, maka ia berpotensi hanya menjadi layer birokrasi baru.

Menurut Anda, apakah badan khusus dibutuhkan atau tidak?
Butuh atau tidak lembaga baru harus diuji dengan prinsip value for money. Badan khusus EBT hanya relevan jika mampu menjawab setidaknya tiga hal, yaitu mempercepat realokasi anggaran dari energi fosil ke EBT, meningkatkan akuntabilitas belanja transisi energi, dan memutus praktik kebijakan sektoral yang saling tumpang tindih.

Tanpa mandat fiskal yang kuat terutama kewenangan pengelolaan insentif, subsidi, dan off-taker kehad-

ran badan ini tidak akan signifikan.
Dalam situasi keuangan negara yang belum stabil, apakah berdampak?

Dalam perspektif anggaran, pembentukan badan baru di tengah tekanan APBN justru berisiko kontraproduktif.

Kami melihat masalah utamanya bukan kekurangan institusi, melainkan rendahnya efektivitas belanja energi. Subsidi dan insentif energi fosil masih jauh lebih besar dibanding dukungan terhadap EBT. Jika badan EBT hanya menambah belanja pegawai dan operasional, maka ini bertentangan dengan prinsip efisiensi fiskal dan keadilan antargenerasi. ■ REN